ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

TESIS

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Tanjungpura

BASILIUS YANCE PRAMONO
NIM. B2052231002

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
JL. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512
Email : pascasarjanafeuntan@gmail.com, website : www.pascasarjanafe.untan.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Basilius Yance Pramono
NIM	:	B2052231002
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Maret 2025



Basilius Yance Pramono
B2052231002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
JL. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Basilius Yance Pramono
NIM	:	B2052231002
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia

Dengan ini menyatakan sebenarnya – benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak tulisan karya orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Ekonomi**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya,



Basilius Yance Pramono
B2052231002

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh :

Nama	:	Basilius Yance Pramono
NIM	:	B2052231002
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Tanggal Ujian	:	17 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
Pembimbing 1	Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si NIP 19720607 199803 2 001	22/03 - 25	
Pembimbing II	Dr. Rosyadi, SE, M.Si NIP 19650921 1993031 001	22/03 - 25	
Penguji 1	Dr.H. Wahyudi, SE, M.Si NIP 19631209 198903 1 004	24/03 - 25	
Penguji II	Dr. Jumhur, SE,M.Si NIP 19670928 199702 1 001	14/03 - 25	

Pontianak, Maret 2025

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si

NIP197206071998032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-NYA sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul ***Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesi.***

Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, informasi, penjelasan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyusunan tesis ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Barkah. S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E. M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E. M.Si selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen pembimbing II Dr. Rosyadi, S,E., M.Si yang banyak memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang tulus dan ikhlas selama proses penulisan tesis.
4. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si dan Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik, dukungan dan arahan dalam rangka perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Pengelola dan Staf Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Para dosen pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berarti selama menempuh Pendidikan.
7. Terima Kasih untuk semua karunia, berkat dan rahmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa hingga saat ini bisa menyelesaikan studi saya sampai akhir.

8. Terima kasih untuk istri dan anak-anak saya begitupula dengan kedua orang tua saya yang sejak selalu memberikan doa, perhatian, motivasi dan materi yang tiada henti dan tanpa pamrih hanya untuk membuat anaknya menjadi yang terbaik.
9. Terimakasih untuk Bapak Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si yang selalu memberikan motivasi serta bantuan biaya selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan angakatan 31 Magister Ilmu Ekonomi.
11. Semua yang telah turut andil memberikan doa, dukungan dan bantuan selama Pendidikan hingga tesis ini selesai, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalas kebaikan semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi maupun teknisnya. Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut terkait dengan topik tesis ini, oleh karena itu mohon kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Pontianak, Maret 2025

Penulis

Basilius Yance Pramono

ABSTRAK

Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia

Basilius Yance Pramono

Email : B2052231002@student.untan.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data panel yang menggabungkan data *cross section* 34 Provinsi di Indonesia dengan beberapa periode waktu *(time series)* dari tahun 2019 hingga 2023. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi berganda *(Multiple Linear Method)* dengan software *EViews* 12. Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia

Kata Kunci : Ketimpamgan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Indonesia, Multiple Linear Method

ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting Income Inequality Between Provinces in Indonesia

Basilius Yance Pramono

Email : B2052231002@student.untan.ac.id

This study aims to determine and test the effect of economic growth, open unemployment rate, poverty, HDI and investment on income inequality in 34 provinces in Indonesia. The data used is panel data that combines cross-section data from 34 provinces in Indonesia with several time periods (time series) from 2019 to 2023. The analysis was carried out using the multiple regression method (Multiple Linear Method) with EViews 12 software. Economic growth and open unemployment rates have a negative and significant effect on income inequality in 34 provinces in Indonesia. Poverty has a positive and significant effect on income inequality in 34 provinces in Indonesia. HDI has a negative and significant effect on income inequality in 34 provinces in Indonesia. While investment has a positive and significant effect on income inequality in 34 provinces in Indonesia

Keywords: Income Inequality, Economic Growth, Open Unemployment Rate, Poverty, Human Development Index, Investment, Indonesia, Multiple Linear Method

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
PENGESAHAN TESIS ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1. Pernyataan Masalah Penelitian 12
2. Pertanyaan Penelitian 13
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Kontribusi Penelitian dan Kontribusi Teoritis 14
1. Kontribusi Penelitian 14
2. Kontribusi Teoritis 14
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1 Landasan Teori 15
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan 15
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 16
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 17
2.1.4 Kemiskinan 18
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 20
2.1.6 Investasi 21
2.2 Kajian Empiris 22
2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan 22
2.2.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan 25
2.2.3 Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan 30

2.2.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan 32
2.2.5 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan 36
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 37
2.3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 37
2.3.2 Hipotesis Penelitian 38
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Bentuk Penelitian 40
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 40
3.3 Data 40
3.4 Variabel Penelitian 40
3.5 Metode Analisis 42
3.5.1 Analisis Data Panel 42
3.5.2 Spesifikasi Model 42
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 43
3.5.4 Model Regresi Data Panel 43
3.5.5 Penentuan Model regresi 44
3.5.6 Model Uji Hipotesis 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
4.1 Hasil Uji Statistik 46
4.1.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 46
4.1.2 Hasil Pemilihan Model Regresi Linier Berganda 48
4.1.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 49
4.2 Pembahasan 52
4.2.1Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 52
4.2.2Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 56
4.2.3Pengaruh Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 59
4.2.4Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 63

4.2.5Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 71
5.1 Kesimpulan 71
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78
Lampiran 1 78
Lampiran 2 79
Lampiran 3 80
Lampiran 4 81
Lampiran 5 82
Lampiran 6 83
Lampiran 7 : 84
Lampiran 8 88
Lampiran 9 89
Lampiran 10 89
Lampiran 11 90
Lampiran 12 90
Lampiran 13 90
Lampiran 14 91
Lampiran 15 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perbandingan antar Variabel dan Provinsi di Indonesia Tahun 2023 4
Tabel 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas 47
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas 47
Tabel 4. 3 Tabel Hasil Uji 48
Tabel 4. 4 Tabel Hasil Uji Hipotesis dari Fixed Effect Model 49
Tabel 4. 5 Produk Domestik Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) di Indonesia 53
Tabel 4. 6 Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal berdasarkan Pendidikan Tertinggi, Tahun 2023 57
Tabel 4. 7 Tabel Garis kemiskinan makanan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan, tahun 2023 60
Tabel 4. 8 Tabel Kategori IPM, tahun 2023 64
Tabel 4. 9 Penaaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Proyek dan Milyar, tahun 2023 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sasaran dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan adalah Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan. Sasaran ini berfokus pada upaya mengurangi disparitas pendapatan di dalam negara dan antarnegara. Di tingkat internasional, ketimpangan terlihat dari perbedaan besar dalam pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika sering menghadapi kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Amerika Utara. Faktor seperti akses yang tidak merata terhadap teknologi, pendidikan, dan pasar global menjadi penyebab utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama internasional melalui bantuan pembangunan, transfer teknologi, dan penghapusan hambatan perdagangan bagi negara-negara miskin. Selain itu, penguatan sistem perpajakan yang adil di tingkat global, seperti pajak karbon atau penghapusan penghindaran pajak oleh korporasi multinasional, juga penting untuk mendukung redistribusi kekayaan antarnegara.

Di tingkat nasional, ketimpangan pendapatan sering kali diperburuk oleh faktor internal seperti kebijakan ekonomi yang tidak merata, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau kelas sosial. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini terlihat dari rasio Gini yang masih cukup tinggi, mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Banyak masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar dan infrastruktur ekonomi. Kebijakan fiskal seperti subsidi bagi kelompok rentan, pengenaan pajak progresif, serta pengembangan wilayah tertinggal menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan ini. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja juga berperan dalam mendorong mobilitas sosial.

Indonesia telah menjadikan pengurangan ketimpangan sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian SDGs, terutama melalui implementasi Tujuan 10. Strategi

yang dilakukan meliputi peningkatan pengupahan yang layak, distribusi lahan melalui program reforma agraria, dan penguatan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, dapat memperoleh manfaat yang setara dari kemajuan ekonomi. Melalui kombinasi kebijakan nasional yang efektif dan dukungan internasional, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan secara signifikan sesuai dengan target SDGs.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan masalah yang cukup rumit dan mendalam, mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan serta kesempatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Walaupun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan selama dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan tetap menjadi isu utama yang memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2020) ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan dalam kesejahteraan, gaya hidup, dan pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh berbagai daerah dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan antar masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks gini, yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, masih berada pada angka yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tidak tersebar merata, menciptakan kesenjangan signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kohesi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu daerah tidak selalu berarti bahwa pendapatan akan merata, meskipun sering dianggap sebagai strategi utama dalam pembangunan ekonomi. Daerah yang mengalami pertumbuhan pesat masih bisa menghadapi ketimpangan pendapatan yang besar. Ketimpangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari perbedaan pendapatan yang menciptakan kelompok kaya dan

miskin, hingga perbedaan antara daerah maju dan tertinggal, serta perbedaan sektor yang memisahkan sektor unggulan dari sektor non-unggulan.

Jika ketimpangan terus berlanjut di antara dua kelompok masyarakat dengan perbedaan penghasilan yang besar, perekonomian bisa dianggap tidak merata. Ketimpangan ini sering disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta ketidakmerataan distribusi sumber energi yang masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Ketimpangan pendapatan juga tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, dengan perbedaan pada tingkat ketimpangan dan tantangan yang dihadapi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Tingkat ketimpangan dapat diukur melalui indeks Gini (Oksamulya & Anis, 2020).

Membahas ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang terdiri dari 38 provinsi, merupakan isu krusial karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara. Ketimpangan pendapatan yang tinggi di antara provinsi-provinsi tidak hanya menghambat potensi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang mengancam persatuan bangsa. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, mineral, dan hasil hutan, distribusi manfaat dari kekayaan ini sangat timpang. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur menikmati kemajuan ekonomi yang pesat dengan infrastruktur yang relatif baik dan aliran investasi yang terus menerus. Sebaliknya, provinsi-provinsi di kawasan Timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur dan Maluku, masih terjebak dalam kemiskinan struktural, akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, serta minimnya infrastruktur dan investasi.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi nasional selama ini belum sepenuhnya berhasil dalam mendistribusikan kekayaan secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam seringkali menjadi sumber keuntungan besar bagi segelintir perusahaan atau individu elit, sementara masyarakat setempat tidak merasakan dampak positif yang signifikan dari eksploitasi sumber daya tersebut. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial yang mendalam. Ketika sebagian besar kekayaan terpusat di

provinsi-provinsi yang sudah maju, provinsi-provinsi tertinggal semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan mereka, memperparah siklus ketimpangan yang merusak prospek pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. 1
Data Perbandingan antar Variabel dan Provinsi di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Tahun 2023					
		Gini Ratio	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Kemiskinan (%)	IPM	Investasi (miliar rupiah)
1	Aceh	0,296	4,23	6,03	14,45	73,4	12.845,28
2	Sumatera Utara	0,309	5,01	5,89	8,15	73,37	40.400,56
3	Sumatera Barat	0,280	4,62	5,94	5,95	73,75	6.411,81
4	Riau	0,324	4,21	4,23	6,68	74,04	80.791,74
5	Jambi	0,343	4,66	4,53	7,58	72,77	9.657,77
6	Sumatera Selatan	0,338	5,08	4,11	11,78	71,62	49.167,07
7	Bengkulu	0,333	4,26	3,42	14,04	72,78	8.431,52
8	Lampung	0,324	4,55	4,23	11,11	71,15	11.141,54
9	Kep. Bangka Belitung	0,245	4,38	4,56	4,52	72,85	9.116,84
10	Kep. Riau	0,340	5,20	6,80	5,69	77,11	21.034,18
11	DKI Jakarta	0,431	4,96	6,53	4,44	82,46	172.178,53
12	Jawa Barat	0,425	5,00	7,44	7,62	73,74	220.031,47
13	Jawa Tengah	0,369	4,98	5,13	10,77	73,39	57.908,12
14	Di Yogyakarta	0,449	5,07	3,69	11,04	81,07	5.748,61
15	Jawa Timur	0,387	4,95	4,88	10,35	73,38	150.495,43
16	Banten	0,368	4,81	7,52	6,17	73,87	108.917,52
17	Bali	0,362	5,71	2,69	4,25	77,1	19.835,99
18	Nusa Tenggara Barat	0,375	1,80	2,80	13,85	70,2	38.231,16
19	Nusa Tenggara Timur	0,325	3,52	3,14	19,96	66,68	5.388,19
20	Kalimantan Barat	0,321	4,46	5,05	6,71	69,41	22.709,17
21	Kalimantan Tengah	0,317	4,14	4,10	5,11	72,2	19.897,26
22	Kalimantan Selatan	0,313	4,84	4,31	4,29	72,5	20.135,19
23	Kalimantan Timur	0,322	6,22	5,31	6,11	78,2	73.411,14
24	Kalimantan Utara	0,277	4,94	4,01	6,45	72,49	28.472,75
25	Sulawesi Utara	0,370	5,48	6,10	7,38	74,36	10.944,60
26	Sulawesi Tengah	0,304	11,91	2,95	12,41	70,95	120.222,81
27	Sulawesi Selatan	0,377	4,51	4,33	8,7	73,46	16.834,34
28	Sulawesi Tenggara	0,371	5,35	3,15	11,43	72,79	14.879,22
29	Gorontalo	0,417	4,50	3,06	15,15	70,45	4.498,78
30	Sulawesi Barat	0,351	5,25	2,27	11,49	67,55	2.398,37
31	Maluku	0,288	5,21	6,31	16,42	70,94	3.598,62
32	Maluku Utara	0,300	20,49	4,31	6,46	70,21	86.558,06
33	Papua Barat	0,370	5,18	5,38	20,49	66,66	1.720,89

No	Provinsi	Tahun 2023					
		Gini Ratio	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Kemiskinan (%)	IPM	Investasi (miliar rupiah)
34	Papua	0,386	4,20	2,67	26,03	62,25	1.306,38
INDONESIA		**0,39**	**5,05**	**5,32**	**9,36**	**73,55**	**1.476.044,09**

Sumber : BPS Indonesia, 2023

Data dari berbagai provinsi di Indonesia tahun 2023 menunjukkan adanya dinamika yang kompleks terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran, serta indeks pembangunan manusia (IPM) antara ketimpangan pendapatan. Dalam konteks ini, salah satu isu utama yang dapat ditelusuri lebih dalam adalah ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini. Ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, peluang pembangunan, dan keadilan di berbagai provinsi. Hal ini dilihat lebih dalam hubungan antara ketimpangan ini dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan indikator lainnya, serta bagaimana ketimpangan ini terbentuk dan potensinya ke depan.

Rasio Gini secara sederhana mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu populasi, dengan nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, dan nilai 1 menunjukkan ketidakmerataan ekstrem, di mana semua pendapatan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Secara nasional, rasio Gini Indonesia tercatat di angka 0,39 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih relatif tinggi. Ketimpangan ini, jika tidak ditangani, dapat memicu masalah sosial dan politik, serta menghambat pembangunan jangka panjang. Provinsi-provinsi yang memiliki Gini Ratio di atas rata-rata nasional (0,39) adalah DKI Jakarta 0,431, Jawa Barat 0,425, DI Yogyakarta 0,449, Jawa Timur 0,387, Gorontalo 0,417, dan Papua 0,386. Gini Ratio yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih besar, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Misalnya, DKI Jakarta dan Jawa Barat, sebagai pusat ekonomi dan industri, sering kali memiliki ketimpangan yang tinggi karena adanya perbedaan besar antara kelompok masyarakat yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan tinggi dan mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. DI Yogyakarta, meskipun

dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, juga memiliki kesenjangan yang sedang akan tetapi tertinggi jika dibandingan dengan provinsi lainnya. Papua dan Gorontalo, di sisi lain, menghadapi ketimpangan yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap ekonomi modern, meski kaya akan sumber daya alam. Distribusi pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan juga berkontribusi pada Gini Ratio yang tinggi di provinsi-provinsi ini.

Provinsi-provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional (5,05%) pada tahun 2023 adalah Aceh 4,23%, Sumatera Barat 4,62%, Riau 4,21%, Jambi 4,66%, Bengkulu 4,26%, Lampung 4,55%, Kep. Bangka Belitung 4,38%, DKI Jakarta 4,96%, Jawa Barat 5,00%, Jawa Tengah 4,98%, Jawa Timur 4,95%, Banten 4,81%, Nusa Tenggara Barat 1,8%, Nusa Tenggara Timur 3,52%, Kalimantan Barat 4,46%, Kalimantan Tengah 4,14%, Kalimantan Selatan 4,84%, Kalimantan Utara 4,94%, Sulawesi Selatan 4,51%, Gorontalo 4,5%, dan Papua 4,2%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah di beberapa provinsi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketergantungan pada sektor primer (pertanian dan pertambangan) yang pertumbuhannya stagnan, serta kurangnya diversifikasi ekonomi. Misalnya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan rendah karena masih mengandalkan sektor pertanian yang rentan terhadap cuaca dan infrastruktur yang belum berkembang dengan baik. Selain itu, provinsi seperti Riau dan Kalimantan Tengah masih sangat bergantung pada sumber daya alam seperti minyak dan gas, yang pertumbuhannya bisa melambat akibat fluktuasi harga komoditas global. Di DKI Jakarta dan Jawa Timur, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap PDB nasional, pertumbuhan mungkin sedikit melambat karena ekonomi yang sudah lebih mapan dan tidak lagi mengalami ekspansi yang signifikan seperti di provinsi yang sedang berkembang pesat.

Todaro & Smith (2020) dalam penelitiannya jika ketimpangan ini berpotensi memperdalam kesenjangan pendapatan antar wilayah di Provinsi di Indonesia, terutama jika pemulihan ekonomi tidak diikuti dengan distribusi pembangunan yang merata. Seperti diungkapkan oleh Todaro & Smith (2020) peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menyebabkan ketidakmerataan pendapatan semakin

meluas, dan sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan pendapatan juga dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwi Rahmawati dkk. (2024) pertumbuhan ekonomi berdampak negatif dan signifikan, pemerataan pendapatan menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lebih banyak peluang kerja, tetapi jika tidak merata antar wilayah, justru dapat memperburuk ketimpangan.

Provinsi-provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata nasional 5,32% pada tahun 2023 adalah Aceh 6,03%, Sumatera Utara 5,89%, Sumatera Barat 5,94%, Kep. Riau 6,8%, DKI Jakarta 6,53%, Jawa Barat 7,44%, dan Banten 7,52%. Tingginya tingkat pengangguran di provinsi-provinsi ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Misalnya, di DKI Jakarta dan Jawa Barat, meskipun merupakan pusat ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang memasuki pasar kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh persaingan yang ketat di sektor-sektor formal, serta dampak dari transformasi digital yang membuat banyak pekerjaan tradisional menjadi tidak relevan.

Di provinsi seperti Aceh dan Sumatera Barat, pengangguran tinggi mungkin disebabkan oleh rendahnya diversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada sektor pertanian, yang sering kali tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Selain itu, ketidakstabilan politik dan konflik di masa lalu di Aceh masih meninggalkan dampak pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini. Provinsi Kep. Riau dan Banten juga menghadapi tantangan serupa, di mana ketergantungan pada sektor industri yang fluktuatif dan ketidakmerataan pengembangan infrastruktur memperburuk masalah pengangguran. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan Shavira Octavia (2009) yang penelitiannya negatif dan signifikan akan tetapi penelitian nya mengatakan tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh daerah-daerah maju. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, terutama karena hanya sebagian kecil populasi yang mendapatkan akses ke pekerjaan formal dengan pendapatan yang layak, sementara kelompok lainnya terjebak dalam

pengangguran atau sektor informal yang kurang produktif. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar di daerah-daerah urban dan industri.

Ada hubungan erat antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional 9,36% pada tahun 2023 adalah Aceh 14,45%, Bengkulu 14,04%, Nusa Tenggara Barat 13,85%, Sumatera Selatan 11,78%, Lampung 11,11%, Jawa Tengah 10,77%, Sulawesi Tengah 12,41%, Sulawesi Tenggara 11,43%, Gorontalo 15,15%, Maluku 16,42%, Papua Barat 20,49%, dan Papua 26,03%. Tingginya angka kemiskinan di provinsi-provinsi ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural yang kompleks. Di Aceh dan Bengkulu, misalnya, ketergantungan pada sektor pertanian dan hasil alam yang sering kali tidak stabil menjadi penyebab utama, di mana fluktuasi harga komoditas dan kerentanan terhadap bencana alam berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.

Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tantangan serupa muncul akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks Papua dan Papua Barat, kemiskinan sangat tinggi disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, minimnya lapangan pekerjaan, serta ketidakstabilan sosial yang memperburuk kondisi ekonomi. Provinsi-provinsi tersebut juga mengalami ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan investasi, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal. Situasi ini menuntut intervensi yang lebih komprehensif dari pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan secara efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian Hindun dkk. (2019) yang kemsikinan bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang kurang stabil dan akses yang terbatas terhadap infrastruktur atau layanan sosial, ketimpangan ini juga bisa terlihat dari perbedaan penurunan kemiskinan antara provinsi-provinsi.

Provinsi-provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional 73,55 pada tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Timur 66,68, Kalimantan Barat 69,41, Nusa Tenggara Barat 70,2, Sulawesi Tengah 70,95, Gorontalo

70,45, Sulawesi Barat 67,55, Papua Barat 66,66, dan Papua 62,25. Rendahnya IPM di provinsi-provinsi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur dan Papua, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas masih sangat terbatas, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi juga menghambat distribusi layanan dan barang, sehingga mempersulit masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar.

Selain itu, provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, di mana ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Faktor sosial dan budaya juga berperan, di mana beberapa daerah memiliki tradisi yang mungkin membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, sehingga mengurangi kontribusi mereka terhadap pengembangan ekonomi. Keterbatasan investasi dan perhatian pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur sosial di daerah-daerah ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan dan menciptakan jurang yang lebih lebar dalam pencapaian IPM dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Upaya yang lebih terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan aksesibilitas layanan dasar sangat diperlukan untuk meningkatkan IPM di provinsi-provinsi tersebut. Sama hal nya dengan penelitian R. D. Zusanti dkk. (2022) yang mengatakan IPM berdampak negatif pada ketimpangan pendapatan, di mana semakin tinggi pendidikan formal yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja.

Ini sejalan dengan Teori Human Capital yang diungkapkan oleh Becker (2009) yang menyatakan bahwa pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Ketimpangan ini menggarisbawahi pentingnya upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua wilayah di Indonesia mendapatkan manfaat dari pembangunan, terutama di provinsi-provinsi yang masih tertinggal dalam hal IPM. Kesenjangan ini juga mencerminkan bahwa

pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, sehingga beberapa wilayah tetap tertinggal dalam hal kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Investasi adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada distribusi manfaat dari investasi tersebut. Provinsi-provinsi yang memiliki nilai investasi di bawah rata-rata nasional Rp 1.476.044,09 miliar pada tahun 2023 adalah Sumatera Barat Rp 6.411,81miliar, Jambi Rp 9.657,77 miliar, Bengkulu Rp 8.431,52 miliar, Lampung Rp 11.141,54 miliar, Kepulauan Bangka Belitung Rp 9.116,84 miliar, DIYogyakarta Rp 5.748,61 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp 5.388,19 miliar, Gorontalo Rp 4.498,78 miliar, Sulawesi Barat Rp 2.398,37 miliar, Maluku Rp 3.598,62 miliar, Maluku Utara Rp 86.558,06 miliar, Papua Barat Rp 1.720,89 miliar, dan Papua Rp 1.306,38 miliar. Rendahnya tingkat investasi di provinsi-provinsi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai, yang membuat proses investasi menjadi tidak efisien dan mengurangi daya tarik bagi investor. Misalnya, provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan besar dalam hal aksesibilitas transportasi dan layanan dasar, yang berpengaruh pada keputusan investor untuk menanamkan modal.

Selain itu, faktor sosial dan politik juga memainkan peran penting dalam menghambat investasi. Beberapa provinsi memiliki situasi sosial yang tidak stabil atau ketidakpastian hukum yang dapat meningkatkan risiko bagi investor. Kurangnya promosi investasi dari pemerintah daerah juga menjadi penyebab, di mana upaya untuk menarik investor mungkin tidak sebanding dengan provinsi-provinsi lain yang lebih maju, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang menawarkan banyak insentif dan fasilitas untuk investasi. Dengan tantangan ini, provinsi-provinsi tersebut perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan infrastruktur, memberikan insentif yang menarik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi guna meningkatkan perekonomian lokal dan menarik lebih banyak modal ke daerah mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyani & Anis (2022) peningkatan investasi di Indonesia seringkali diiringi oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Meskipun investasi mampu memperluas kesempatan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat karena bertambahnya pendapatan yang diterima peningkatan kesejahteraan ini dapat memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, investasi berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, dan ketika tingkat investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi juga cenderung naik. Peningkatan pertumbuhan ini, pada gilirannya, memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia tetap menjadi isu kritis yang membutuhkan perhatian mendalam dalam analisis ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan stabilitas pascapandemi, ditopang oleh peningkatan investasi dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), distribusi manfaat dari kemajuan ini masih sangat tidak merata. Hal ini tercermin dari berbagai indikator ekonomi dan pembangunan, seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan disparitas regional dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Investasi yang cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah maju, seperti Jawa dan beberapa daerah metropolitan, memperkuat kesenjangan antarwilayah. Sementara itu, daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas masih tertinggal dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Ketimpangan ini berkontribusi pada sulitnya masyarakat di wilayah tertinggal untuk keluar dari siklus kemiskinan, yang pada akhirnya memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin.

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi, khususnya di sektor informal, menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok berpenghasilan rendah belum memiliki akses ke pekerjaan yang layak. Meski IPM nasional meningkat, disparitas akses pendidikan dan kesehatan antara wilayah maju dan tertinggal tetap menjadi faktor yang memperburuk ketimpangan pendapatan. Akumulasi kondisi ini mengindikasikan bahwa kelompok miskin menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh peluang ekonomi yang setara.

Urgensi penelitian terkait ketimpangan pendapatan terletak pada identifikasi dan pengukuran lebih rinci terhadap disparitas antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta analisis dampak kebijakan redistributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Gap penelitian yang perlu ditelusuri lebih lanjut mencakup bagaimana hubungan kausal

antara investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan dapat diperbaiki melalui kebijakan berbasis inklusi. Selain itu, pendekatan yang fokus pada keberlanjutan pengembangan wilayah tertinggal, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi, perlu dieksplorasi secara lebih mendalam untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia".***

1.2 Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah Penelitian

Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang ada di setiap negara dan merupakan permasalahan yang berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Permasalahan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM, dan investasi terhadap Gini Ratio menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi yang signifikan, ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah serius. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif hanya menguntungkan segelintir kelompok, terutama di wilayah yang lebih maju, sementara daerah tertinggal masih berjuang dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan. Meskipun IPM meningkat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih sangat terbatas bagi kelompok miskin, memperparah ketimpangan pendapatan. Investasi yang terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu tidak menciptakan lapangan kerja berkualitas secara merata, menyebabkan kelompok berpenghasilan rendah terus terjebak dalam sektor informal dengan pendapatan minim. Hubungan erat antara faktor-faktor ini dengan peningkatan Gini Ratio menegaskan bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang adil dan inklusif, pertumbuhan ekonomi yang ada justru memperlebar jurang ketimpangan, yang harus segera dibahas dan ditangani secara serius.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia?
2. Apakah pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia?
3. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia?
4. Apakah IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia?
5. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia.

1.4 Kontribusi Penelitian dan Kontribusi Teoritis

1. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan kedepan agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan petumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM dan investasi dalam pernurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi antar Provinsi di Indonesia.

2. Kontribusi Teoritis

Mampu memberikan masukan/kontribusi bagi pihak pengambil keputusan dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia pihak terkait termasuk peneliti tentang petumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM dan investasi dalam pernurunan ketimpangan pendapatan.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Gambaran permasalahan ketimpangan pendapatan yang signifikan, ketimpangan pendapatan di Indonesia terlihat jelas ketika membandingkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM dan investasi di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan beberapa wilayah Sumatera cenderung menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan menerima investasi yang lebih besar, sementara provinsi di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara, masih tertinggal dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih tinggi serta IPM yang lebih rendah. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan lebih terbatas di provinsi-provinsi ini, memperburuk ketimpangan. Ketimpangan antarwilayah ini memperkuat Gini Ratio secara nasional, di mana pembangunan dan kesempatan ekonomi terpusat di beberapa provinsi saja, meninggalkan daerah lain dalam kondisi ekonomi yang stagnan.